

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2023



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 1 TELP. (0541) 20900020-28 KODE POS. 75511
TENGGARONG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, 28 Februari 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara



Dr. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Madya
710041007011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tupoksi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Perencanaan Strategis	26
2.2 Perjanjian Kinerja	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1 Capaian Kinerja.....	44
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020	74
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Perbaikan Kedepan.....	97
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut

Menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administratif, mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta pelaksanaan sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah..

1.3.2 Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan administrasi keuangan Daerah;
- d. Menetapkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah;
- e. Menetapkan kebijakan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2023 maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi maka mulai tahun 2023 struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perubahan. Disisi lain dengan adanya perubahan tersebut harus dihadapi dengan tidak mengurangi kinerja sekretariat daerah.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 disebutkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administratif, mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta pelaksanaan sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (pasal 4). Sekretariat Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; c. Merumuskan kebijakan administrasi keuangan Daerah;
- c. Menetapkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah;
- d. Menetapkan kebijakan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Adapun permasalahan yang dapat dirinci berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah :

No	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kinerja penyelenggara	Rendahnya koordinasi dan	Penyampaian informasi kebijakan, kegiatan dan capaian kinerja

No	POKOK MASALAH		MASALAH	AKAR MASALAH
	Bagian Tata Pemerintahan	an pemerintah daerah masih rendah	sosialisasi kebijakan, kegiatan dan capaian kinerja penyelenggara n pemerintah daerah	<p>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum optimal</p> <p>Belum semua Kepala Perangkat Daerah memahami dan berkomitmen dalam mencapai kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>Minimnya koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyusunan LPPD</p> <p>Adanya pergantian personil yang menangani LPPD di Perangkat Daerah sehingga memerlukan waktu untuk belajar kembali terkait kegiatan yang ditanganinya</p> <p>Koordinasi dan fasilitasi proses adm PAW, Pemilu, izin, proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian KDH</p> <p>Ada beberapa uraian tugas dan IKK serta indikator SPM yang Belum sinkron di Perangkat Daerah</p> <p>Penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi kebijakan otonomi daerah</p>
2	Bagian Kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya pelayanan bagian kesejahteraan rakyat	Banyaknya permintaan masyarakat di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	<p>Tingginya permintaan hibah dan bansos untuk pembangunan tempat ibadah, madrasah dan ponpes</p> <p>Tingginya permintaan bantuan akibat musibah dan bencana alam bagi masyarakat</p> <p>Tingginya permintaan beasiswa</p>
3	Bagian Kerjasama	Belum Maksimalnya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Yang Sudah Dilaksanakan	Hasil Kerja Sama Daerah belum termanfaatkan dengan baik guna mendukung	<p>Minimnya kualitas dan kuantitas SDM perangkat daerah khususnya OPD teknis yang memahami program KSD</p> <p>Belum teranggarkan pendanaan guna mendukung program kerjasama daerah pada Perangkat Daerah</p>

No	POKOK MASALAH		MASALAH	AKAR MASALAH
		(ditandatangani KDA) dan belum fokus terhadap isu strategis daerah	penyelenggaraan layanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap prioritas program pembangunan daerah	Perbedaan kebijakan antar daerah membuat kerjasama antar daerah tidak berjalan maksimal
		Kerjasama yang dilaksanakan masih bersifat ego sektoral (hanya mangakomodir kepentingan OPD tertentu)		
		Penyusunan Naskah KSD belum terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik	Proses Dokumentasi, Penyusunan, Penyelesaian Naskah KSD masih membutuhkan waktu yang lama	Masih minimnya SDM dalam menterjemahkan arah kebijakan pelaksanaan KSD
		Minimnya SDM dalam pemahaman tata cara penyusunan Naskah KSD	Belum Adanya SOP alur penyusunan naskah KSD Daerah dan Evaluasi hasil KSD	Perbedaan pemahaman bentuk naskah Kerjasama dengan mitra
4	Bagian Perekonomian	Kinerja tim pengendalian inflasi daerah kurang optimal.	Koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan iflasi daerah masih kurang.	Pemahaman antar anggota tim tentang pentingnya kinerja tim pengendalian inflasi masih belum optimal
Kuranginya komitmen Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam menjaga/mengendalikan inflasi daerah.				
Kuranginya membangun Kerjasama dengan daerah penghasil (surplus)				
Minimnya langkah yang inovatif dalam pengendalian inflasi daerah				
5	Bagian Admnistrasi Pembangunan	Belum optimalnya layanan fasilitasi administrasi pembangunan	banyaknya permasalahan kebijakan administrasi pembangunan yang belum diselesaikan	Minimnya asn yang pemahaman regulasi pembangunan
Sosialisasi regulasi pembangunan yang belum dilaksanakan				
Belum adanya pedoman khusus terkait layanan fasilitasi administrasi pembangunan				

No	POKOK MASALAH		MASALAH	AKAR MASALAH
				Banyaknya pengaduan masyarakat terkait pembangunan
				Waktu pelaksanaan
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa masih belum tepat waktu	Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa	<p>Tingkat kepatuhan dalam mengumumkan RUP masih rendah</p> <p>Minimnya penggunaan SPSE dalam proses tender dan non tender</p> <p>Minimnya SDM TIK di BPBJ dalam pengembangan sistem informasi pendukung SPSE</p> <p>Minimnya SDM PBJ</p> <p>Menumpuknya PBJ di akhir tahun</p> <p>Kurangnya Pelaksanaan Diklat dan Bimtek Kompetensi PBJ</p>
7	Bagian Sumber Daya Alam	Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Persentasi jumlah aduan Masyarakat terhadap permasalahan di Bidang Sumber Daya Alam	<p>Kurangnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan undangan</p> <p>Kurangnya informasi / Masyarakat terhadap Regulasi pengelolaan Sumber Daya Alam</p> <p>Rendanya pemahaman Masyarakat terkait Regulasi pengelolaan Sumber Daya Alam</p> <p>Tingginya koplik Masyarakat terhadap perusahaan</p>
8	Bagian Umum	Belum Optimalnya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Pada Sekretariat Daerah	Pelayanan dan Penyelenggaraan terhadap Sarana dan Prasarana sebagai penunjang urusan pemerintah dilingkungan kantor Bupati Kabupaten Kutai	<p>Belum diperbaharui nya SOP mengenai pelayanan terkait penanganan sarana dan prasarana</p> <p>Tidak sesuainya jumlah permintaan peralatan penunjang kerja dan logistik dengan anggaran yang ada</p> <p>Tidak sesuainya perencanaan terkait sarana dan prasarana Gedung dengan alokasi anggaran</p>

No	POKOK MASALAH		MASALAH	AKAR MASALAH
			Kartanegara (Sekretariat Daerah) belum optimal	
			Belum optimalnya penataan barang milik daerah dilingkungan Sekretariat daerah	Tidak tertibnya dalam hal penguasaan aset, terutama untuk aset dalam penguasaan pejabat yang purna tugas, ataupun aset yang digunakan oleh pihak ketiga.
				Minimnya SDM yang memahami aturan penataan aset
				Tidak sinkronnya antara data SIMDA barang dengan fisik barang yang ada
				Kurangnya Koordinasi dengan OPD terkait perihal penataan Aset
			Belum optimalnya pelayanan surat menyurat dan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran masih dilakukan secara manual dan belum didukung teknologi informasi
				Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi
				Penataan ASN masih belum berdasarkan beban kerja serta masih rendahnya kompetensi ASN dilingkungan Sekretariat Daerah
9	Bagian Organisasi	Belum terwujudnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Implementasi reformasi birokrasi masih tidak optimal dalam 8 area perubahan	Penataan organisasi belum tepat fungsi, belum berdasarkan kinerja dan belum berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik
				Belum tepatnya struktur tugas dan fungsi serta kesesuaian jabatan
				Belum tersedianya informasi kebutuhan jabatan secara digital
				Belum optimalnya manajemen saking

No	POKOK MASALAH		MASALAH	AKAR MASALAH
				Kurang optimalnya penerapan standar pelayanan publik
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepercayaan dan opini masyarakat terhadap kebijakan dan capaian kinerja kepala daerah/pimpinan masih rendah	Minimnya informasi dan sosialisasi kebijakan, kegiatan dan capaian kinerja kepala daerah/pimpinan	Penyampaian informasi kebijakan, kegiatan dan capaian kinerja kepala daerah/pimpinan yang tidak tepat waktu (tidak update) dan tidak menarik (rutinitas/seremonial)
Media informasi Pemkab Kukar yang belum menjadi sumber informasi yang aktual bagi masyarakat				
Minimnya penyampaian informasi kebijakan, kegiatan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang menjadi capaian kinerja Kepala Daerah/Pimpinan				
Minimnya SDM dan tidak mendukungnya sarana prasarana penunjang dan mobilisasi peliputan, pengelolaan informasi dan publikasi				
Layanan kegiatan keprotokolan kepala daerah/pimpinan yang belum maksimal		Intensitas kegiatan keprotokolan kepala daerah/pimpinan yang tinggi dan tidak terjadwal	Permintaan acara/kegiatan dari masyarakat atau kelembagaan yang banyak dan mendadak	
			Permintaan acara/kegiatan yang harus dihadiri Kepala Daerah/Pimpinan (tidak mau diwakilkan/dihadiri Pejabat lain)	
			Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM keprotokolan	
			Minim dan tidak mendukungnya sarana prasarana penunjang dan mobilisasi keprotokolan	
11	Bagian Perencanaan Keuangan	Belum optimalnya predikat akuntabilitas kinerja sekretariat daerah	Sistem perencanaan yang belum maksimal	Penyediaan aplikasi keuangan yang sering berubah-ubah dari pemerintah pusat terkait perencanaan, penatausahaan sampai kepada pelaporan keuangan akhir
Pergantian antara aplikasi keuangan yang satu dengan lainnya tidak didahului dengan sosialisasi yang cukup waktu /mendadak serta penyediaan perangkat				

No	POKOK MASALAH		MASALAH	AKAR MASALAH
				<p>aplikasi yang masih kurang lengkap sehingga banyak yang harus dilakukan input manual</p> <p>Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM Perencanaan Dan Keuangan</p> <p>Minim dan tidak mendukungnya sarana prasarana penunjang untuk kegiatan Perencanaan Dan Keuangan</p>
12	Bagian Hukum	Belum maksimalnya pelayanan bantuan hukum berupa konsultasi hukum kepada aparatur Sipil Negara, aparatur desa dan masyarakat umum	Konsultasi hukum dilayani secara tatap muka dan baru menyentuh kalangan pimpinan perangkat daerah	<p>Belum dimanfaatkan fasilitas website jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk pelayanan konsultasi hukum</p> <p>Belum dimanfaatkan jaringan telekomunikasi telpon untuk pelayanan konsultasi hukum</p> <p>Minimalnya kualitas dan kuantitas SDM Sub Bagian bantuan hukum yang memberikan konsultasi hukum secara online</p> <p>Minimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan konsultasi hukum secara online</p>

No	POKOK MASALAH		MASALAH	AKAR MASALAH
				Minimalnya literasi teori hukum, putusan peradilan dan umum
				Belum ada SDM di Sub bagian Bantuan Hukum yang khusus mengelola pelayanan konsultasi hukum secara online
		Belum maksimalnya pelayanan bantuan hukum penanganan perkara hukum kepada aparaturn Sipil Negara dan aparaturn desa	Bantuan hukum berupa penanganan perkara hukum di peradilan baru melayani pimpinan daerah, kepala organisasi perangkat daerah dan kepala desa	Belum diketahui oleh aparaturn sipil negara dan aparaturn desa mengenai pelayanan bantuan hukum berupa pendampingan hukum dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di peradilan
				Belum diketahui oleh aparaturn sipil negara dan aparaturn desa mengenai pelayanan bantuan hukum berupa pendampingan hukum dalam penanganan perkara hukum di luar Peradilan
				Minimalnya kualitas dan kuantitas SDM Analis Advokasi
				Minimnya literasi teori hukum, putusan peradilan dan umum
				Belum bertanggung pendanaan untuk melakukan gugatan dari pihak Pemda Kukar terhadap Pihak lain
				Penanganan perkara bantuan hukum hanya bersifat pasif (menunggu gugatan dari pihak lain, belum ada tindakan gugatan dari pihak pemda Kukar terhadap pihak lain)
		Belum terjalin kerjasama yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan HAM	Kerjasama antar perangkat daerah dalam kegiatan Rencan Aksi HAM dan Kabupaten/ kota peduli HAM belum berkesinambungan	Minimalnya kualitas dan kuantitas SDM perangkat daerah yang terlibat
				Perubahan parameter, subyek dan obyek pelaporan kegiatan Rencana Aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM yang berubah setiap tahun
				Dualisme verifikasi antara kanwil Hukum dan HAM dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum; dan
 4. Bagian Kerja Sama.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 4. Bagian Sumber Daya Alam.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - a. Kepala Subbagian Protokol dan Jabatan Pelaksana.

TUGAS DAN FUNGSI

Sekretaris Daerah

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administratif, mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta pelaksanaan sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan administrasi keuangan Daerah;
 - d. menetapkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah;
 - e. menetapkan kebijakan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati..

TUGAS DAN FUNGS

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
 - b. penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesra;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerjasama yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Pemerintahan

- (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dan menyajikan data menjadi informasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
 - e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan 9 tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan menyajikan data menjadi informasi di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Hukum

- (1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hukum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan menyajikan data menjadi informasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerja Sama

- (1) Bagian Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kerja Sama yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kepala Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan menyajikan data menjadi informasi di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama;
 - f. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
 - c. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perekonomian

- 1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perekonomian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- 2) Kepala Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan menyajikan menjadi informasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- d. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan menyajikan data menjadi informasi di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - d. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan menyajikan data menjadi informasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Sumber Daya Alam

- (1) Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Sumber Daya Alam yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Kepala Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan menyajikan data menjadi informasi di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
 - d. mengoordinasikan, menginventarisasi dan memfasilitasi permasalahan bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
 - e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum

- (1) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum

- (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; b
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 1. administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
 2. administrasi umum Perangkat Daerah;
 3. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 4. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah; dan
 5. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah.
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Organisasi

- (1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Kepala Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan menyajikan data menjadi informasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penataan organisasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan menyajikan data menjadi informasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - d. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 2. administrasi keuangan Perangkat Daerah;
 3. administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
 4. administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wakil Bupati.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan menyajikan data menjadi informasi di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi;
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
 - d. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Protokol

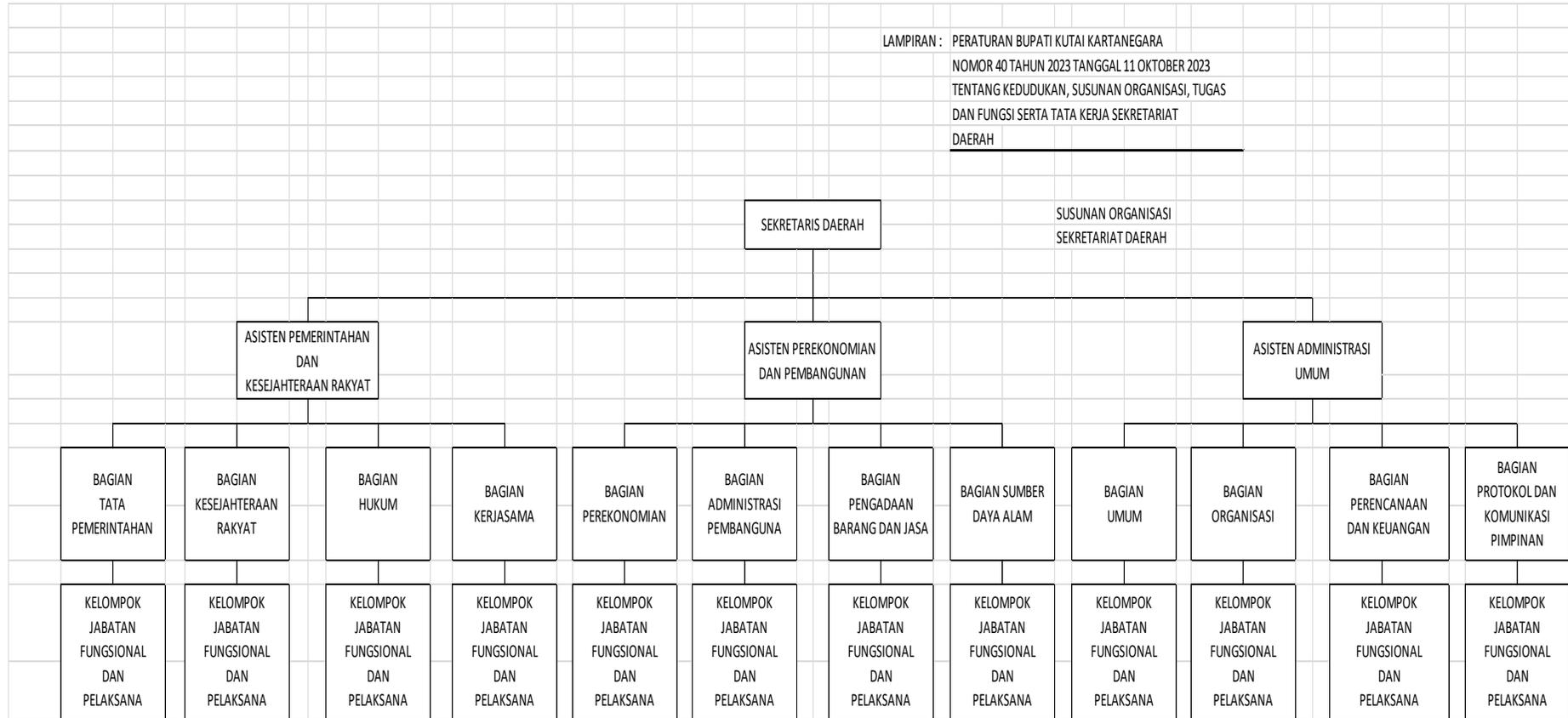
- (1) Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Protokol yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (2) Kepala Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan urusan tata protokoler, menghimpun dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan tamu Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Protokol mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. merencanakan pelaksanaan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan protokol;
 - g. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan fasilitasi keprotokolan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Sekretariat Daerah.
- (5) Sistem dan Mekanisme Kerja kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2021 tentang 23 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar: 2.1. berikut ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Sejahtera adalah Kondisi Masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan

Berbahagia adalah kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Misi ke satu pada RPJMD yaitu *“Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”* Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengekoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengekoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengekoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Berikutnya akan dituangkan dalam Tabel 2.1. tentang matrik hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1				
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran				
Visi :				
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatnya kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administratif	Indeks kualitas manajemen kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan
				Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan
				Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan

				Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja pada bobot nilai lebih dari atau sama dengan 10%
			Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama
				Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama
				Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama

				Nilai LPPD
			Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam
				Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam
				Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen LPPD.
2. Peningkatan Penataan Daerah.
3. Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.
4. Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Peningkatan Pelayanan Hukum Daerah.
6. Penataan Kelembagaan Tepat Fungsi dan Struktur.
7. Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pelayanan Publik.
8. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Umum.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen LPPD	Peningkatan Pembinaan Penyusunan Dokumen LPPD untuk Tim Penyusun dan Tim Evaluasi
2.	Peningkatan Penataan Daerah	Peningkatan Penetapan Tapal Batas Wilayah Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan
3.	Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatkan Fasilitasi Penyusunan Pedomanan Pelaksanaan APBD Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Fisik Kegiatan Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Berbasis Online
4.	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Peningkatan Koordinasi antar Perangkat Daerah Mengoptimalkan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD

No.	Strategi	Arah Kebijakan
5.	Peningkatan Pelayanan Hukum Daerah	Optimalisasi Layanan Konsultasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum Meningkatkan Implementasi Rencana Aksi Nasional Ka Asasi Manusia Meningkatkan Pembinaan Sadar Hukum untuk ASN dan Masyarakat Peningkatan Penyebaran Informasi Produk Hukum Daerah
6.	Penataan Kelembagaan Tepat Fungsi dan Struktur	Audit Kelembagaan
7.	Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pelayanan Publik	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelayanan dan SOP
8.	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Umum	Peningkatan Layanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	
	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja pada bobot nilai lebih dari atau sama dengan 10%	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	
	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	
	Nilai LPPD	

	Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	
	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja pada bobot nilai lebih dari atau sama dengan 10%	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Program Perekonomian Dan Pembangunan

	Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	
	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja pada bobot nilai lebih dari atau sama dengan 10%	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	
	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan,	

	Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	
	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja pada bobot nilai lebih dari atau sama dengan 10%	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	89	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai
	Efektifitas Koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	75	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	98	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Indeks Kualitas Kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	96	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai
	Efektifitas Koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	79	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	88	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai
	Nilai LPPD	Nilai	3,5	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Indeks Kualitas Kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	89,7	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai
	Efektifitas Koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	70,5	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	82	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	25	\sum Jumlah Temuan yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	\sum Jumlah Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	\sum Jumlah capaian persentasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	\sum Jumlah Kepatuhan LHKPN
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	\sum Jumlah Kepatuhan LHKASN
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	\sum Jumlah Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	\sum Jumlah Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	\sum Jumlah Inovasi yang dibuat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah				oleh Tim Inovasi
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	\sum Jumlah Capaian Output Kegiatan
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	\sum Jumlah Capaian realisasi kegiatan fisik
	Persentase realisasi keuangan	Persen	100	\sum Jumlah Capaian realisasi kegiatan keuangan
Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	\sum Jumlah Capaian Laporan manajemen resiko
Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	\sum Jumlah Capaian dokumen rivue IKU
Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	\sum Jumlah Capaian Kegiatan
Melaksanakan Pengembangan 7 Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	\sum Jumlah Capaian Persetansi Pengembangan Kompetensi ASN
Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100	\sum Jumlah Capaian Persetansi Pelaksanaan dan pemenuhan monitoring center for prevention KPK
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Point	100	\sum Jumlah Capaian Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2022	Target 2023	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah
1	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	NA	88	89	95
2	Efektifitas Koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	NA	70	75	90
3	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	NA	91	96	99
4	Indeks Kualitas Kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	NA	94	96	98
5	Efektifitas Koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	NA	78	79	91
6	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	NA	87	88	95
7	Nilai LPPD	Nilai	NA	3,4	3,5	3,8

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2022	Target 2023	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah
8	Indeks Kualitas Kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	NA	84,7	89,7	95,7
9	Efektifitas Koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	NA	68,5	70,5	85,5
10	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	NA	80	82	90
11	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	NA	25	25	100
12	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	NA	100	100	100
13	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	NA	100	100	100
14	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	NA	100	100	100
15	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	NA	100	100	100
16	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	NA	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2022	Target 2023	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah
17	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	NA	100	100	100
18	Jumlah Inovasi	Jumlah	NA	1	1	5
19	Capaian Output Kegiatan	Persen	NA	100	100	100
20	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	NA	100	100	100
21	Persentase realisasi keuangan	Persen	NA	100	100	100
22	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	NA	2	2	10
23	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	NA	1	1	5
25	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	NA	4	4	20
26	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	NA	100	100	100
27	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	NA	100	100	100
28	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Point	NA	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar 102.14.%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja ~~SANGAT TINGGI~~ / ~~TINGGI~~ / ~~SEDANG~~ / ~~RENDAH~~ / ~~SANGAT RENDAH~~. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	89	89,5	100,56	Sangat Tinggi
	Efektifitas Koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	75	85,1	113,47	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	98	97,15	99,13	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Indeks Kualitas Kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama	Nilai	96	94	97,92	Sangat Tinggi
	Efektifitas Koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama	Nilai	79	79,67	100,85	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama	Nilai	88	88,9	101,02	Sangat Tinggi
	Nilai LPPD	Nilai	3,5	3,1	88,57	Tinggi
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Indeks Kualitas Kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	89,7	90,2	100,56	Sangat Tinggi
	Efektifitas Koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	70,5	74,5	105,67	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	82	87	106,10	Sangat Tinggi
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	25	36	144	Sangat Tinggi
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	68,4	100	Sangat Tinggi
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	Sangat Tinggi
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase realisasi keuangan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	4	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Melaksanakan Pengembangan 7 Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Point	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata					102,14	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2023 sebesar 89 dan realisasinya 89,5 capaian kinerja sebesar 100,56% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2023 sebesar 75 dan realisasinya 85,1 capaian kinerja sebesar 113,47% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-3” tahun 2023 sebesar 98 dan realisasinya 97,15 capaian kinerja sebesar 99,13% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

4) Indikator Kinerja ke-4

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-4” tahun 2023 sebesar 96 dan realisasinya 94 capaian kinerja sebesar 97,92% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

5) Indikator Kinerja ke-5

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-5” tahun 2023 sebesar 79 dan realisasinya 79,67 capaian kinerja sebesar 100,85% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2023

6) Indikator Kinerja ke-6

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-6” tahun 2023 sebesar 88 dan realisasinya 88,9 capaian kinerja sebesar 101,02% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2023

7) Indikator Kinerja ke-7

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-7” tahun 2023 sebesar 3,5 dan realisasinya 3,1,9 capaian kinerja sebesar 88,57% sumber data dari Hasil Tim Penilai Tahun 2023

8) Indikator Kinerja ke-8

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-8” tahun 2023 sebesar 89,7 dan realisasinya 90,2 capaian kinerja sebesar 100,56% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2023

9) Indikator Kinerja ke-9

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-9” tahun 2023 sebesar 70,5 dan realisasinya 74,5 capaian kinerja sebesar 105,67% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2023

10) Indikator Kinerja ke-10

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-10” tahun 2023 sebesar 82 dan realisasinya 87 capaian kinerja sebesar 106,10% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2023

11) Indikator Kinerja ke-11

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-11” tahun 2023 sebesar 25 dan realisasinya 36 capaian kinerja sebesar 144% sumber data Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kab. Kutai Kartanegaradan dan BPK. Target kinerja tidak tercapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya koordinasi antar bagian di lingkungan sekretariat daerah solusi/rekomendasinya adalah perlu adanya tindaklanjut di tahun depan

12) Indikator Kinerja ke-12

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-12” tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

13) Indikator Kinerja ke-13

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-13” tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Hasil Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagian Umum dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

14) Indikator Kinerja ke-14

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-14” tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Hasil Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

15) Indikator Kinerja ke-15

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-15” tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Hasil Tingkat Kepatuhan LHKASN Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kab. Kutai Kartanegaradan Target kinerja tercapai target

16) Indikator Kinerja ke-16

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-16” tahun 2023 sebesar 60-70 dan realisasinya 68,4 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Hasil Predikat Tata Kelola Arsip Laporan Hasil Evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kutai Kartanegaradan Target kinerja tercapai target

17) Indikator Kinerja ke-17

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-17” tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau Kab. Kutai Kartanegaradan Target kinerja tercapai target

18) Indikator Kinerja ke-18

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-18” tahun 2023 sebesar 1 dan realisasinya 1 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Jumlah Inovasi Bagian Organisasi Setda. Kab. Kutai Kartanegaradan Target kinerja tercapai target.

19) Indikator Kinerja ke-19

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-19” tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Capaian Output Kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

20) Indikator Kinerja ke-20

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-20” tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data realisasi kegiatan fisik Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

21) Indikator Kinerja ke-21

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-21” tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data realisasi keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

22) Indikator Kinerja ke-22

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-22” tahun 2023 sebesar 2 dan realisasinya 2 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

23) Indikator Kinerja ke-23

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-23” tahun 2023 sebesar 1 dan realisasinya 1 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Reviu Indikator Kinerja Utama Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

24) Indikator Kinerja ke-24

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-24” tahun 2023 sebesar 4 dan realisasinya 4 capaian kinerja sebesar 100% sumber kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

25) Indikator Kinerja ke-25

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-25 tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Pengembangan Kompetensi ASN 12 Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

26) Indikator Kinerja ke-26

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-26 tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK 12 Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

27) Indikator Kinerja ke-27

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-27 tahun 2023 sebesar 100 dan realisasinya 100 capaian kinerja sebesar 100% sumber data Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 12 Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 102.14%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 99.29%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 2,85%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	NA	NA	NA	88	88,14	100,16	89	89,5	100,56	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Efektifitas Koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	NA	NA	NA	70	85,1	121,57	75	85,1	113,47	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	NA	NA	NA	91	91,45	100,49	98	97,15	99,13	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Indeks Kualitas Kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	NA	NA	NA	94	94	100,00	96	94	97,92	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Efektifitas Koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	NA	NA	NA	78	79,667	102,14	79	79,67	100,85	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	NA	NA	NA	87	87	100,00	88	88,9	101,02	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai LPPD	Nilai	NA	NA	NA	3,5	-	-	3,5	3,1	88,57	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Indeks Kualitas Kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	NA	NA	NA	84,7	86,63	102,28	89,7	90,2	100,56	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi	Efektifitas Koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	NA	NA	NA	68,5	74,5	108,76	70,5	74,5	105,67	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam												
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	NA	NA	NA	80	87,04	108,80	82	87	106,10	
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	NA	NA	NA	29	33	113,79	25	36	144	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	NA	NA	NA	100	100	100,00	100	100	100	
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	NA	NA	NA				100	100	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100	
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	87,17	87,17	100	100	100,00	100	100	100	
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	52,58	75,11	B (60-70)	52,71	87,85	B (60-70)	68,4	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	NA	NA	NA	100	100	100,00	100	100	100	
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	NA	NA	NA	100	100	100,00	100	100	100	
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	NA	NA	NA	100	100	100,00	100	100	100	
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi keuangan	Persen	NA	NA	NA	100	100	100,00	100	100	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	NA	NA	NA	2	2	100,00	2	2	100	
Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100	
Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4	100	
Melaksanakan Pengembangan 7 Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Tahun 2023 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100	
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100	

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	89	89,5	100,56
Efektifitas Koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	75	85,1	113,47
Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	98	97,15	99,13
Indeks Kualitas Kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	96	94	97,92

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Efektifitas Koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	79	79,67	100,85
Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	88	88,9	101,02
Nilai LPPD	3,5	3,1	88,57
Indeks Kualitas Kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	89,7	90,2	100,56
Efektifitas Koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	70,5	74,5	105,67
Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	82	87	106,10
Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	25	36	144

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	100	100	100
Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	100	100	100
Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	100	100	100
Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	100	100	100
Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	B (60-70)	68,4	100
Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	100	100	100
Jumlah Inovasi	1	1	100
Capaian Output Kegiatan	100	100	100
Persentase realisasi kegiatan fisik	100	100	100
Persentase realisasi keuangan	100	100	100
Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	2	2	100
Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	1	1	100
Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	4	4	100

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100	100	100
Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	100	100	100
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	100	100	100

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	(6) = (3-5)	7
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	100,5618	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93,82	6,741798	
	Efektifitas Koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan	113,4667		93,82	19,64667	

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
pimpinan dan perencanaan dan keuangan	komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan					
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	99,13265		93,82	5,312653	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Indeks Kualitas Kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,91667	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	94,28	3,636667	
	Efektifitas Koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	100,8481		94,28	6,568101	
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	101,0227		94,28	6,742727	
	Nilai LPPD	88,57143		94,28	-5,70857	
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan	100,5574	Program Perekonomian Dan Pembangunan	90,91	9,647414	

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	jasa dan sumber daya alam					
	Efektifitas Koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	105,6738		90,91	14,76376	
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	106,0976		90,91	15,18756	

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 yaitu Persentase Aset yang dimanfaatkan dilingkungan Sekretariat Daerah dengan target sebesar 78% dan realisasinya. 100%. Target kinerja tercapai
- Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 yaitu Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A dengan target sebesar 70% dan realisasinya. 80%. Target kinerja tercapai.

- Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 yaitu Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan dengan target sebesar 92% dan realisasinya 100.%. Target kinerja tercapai.
- Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 78 dan realisasinya. 77,65 Target kinerja tidak tercapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurang pemahaman dalam penyusunan SAKIP.

2) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

- Indikator kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 yaitu Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100 dan realisasinya. 100%. Target kinerja tercapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya pemahaman dalam penyusunan kebijakan tata Pemerintahan.
- Indikator kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 yaitu Mempresentasikan Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan dengan target sebesar 100 dan realisasinya. 100%. Target kinerja tidak tercapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya pemahaman dalam Rumusan kebijakan bidang Kesra.
- Indikator kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 yaitu Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP dengan target sebesar 100 dan realisasinya. 100%. Target kinerja tercapai target.
- Indikator kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 yaitu Berikan Kerjasama yang di tindak lanjuti dengan target sebesar 85 dan realisasinya 100%. Target kinerja tercapai target.

3) Program Perekonomian Dan Pembangunan

- Indikator kinerja Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2023 yaitu Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100 dan realisasinya. 100%. Target kinerja tercapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya pemahaman dalam Penyusunan Kebijakan ekonomi.

- Indikator kinerja Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2023 yaitu Persentase kebijakan permasalahan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan dengan target sebesar 85 dan realisasinya. 100%. Target kinerja melebihi target.
- Indikator kinerja Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2023 yaitu Persentase pengadaan barang jasa yang diselesaikan dengan target sebesar 100 dan realisasinya. 100%. Target kinerja tercapai target.
- Indikator kinerja Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2023 yaitu Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100%. Target kinerja tercapai target.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya kualitas Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Persentase Aset yang dimanfaatkan dilingkungan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78	100	100	Tercapai
	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A		70	80	114,29	Tercapai
	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan		92	100	108,70	Tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		78	77,65	99,55	Tidak Tercapai
Meningkatnya kualitas Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	Tercapai
	Mempresentasikan Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan		100	100	100	Tercapai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	Persentase Peraturan Daerah (PERDA dan PERBUP)		100	100	100	Tercapai
	Berikan Kerjasama yang di tindak lanjuti		85	100	117,65	Tercapai
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Program Perekonomian Dan Pembangunan	100	100	100	Tercapai
	Persentase kebijakan permasalahan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan		85	100	117,65	Tercapai
	Persentase pengadaan barang jasa yang diselesaikan		100	100	100	Tercapai
	Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti		100	100	100	Tercapai

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 95.39%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
Meningkatnya kualitas Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Indeks kualitas kebijakandaerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	185.550.727.879,00	174.078.450.455,00	93,82	11.472.277.424,00
	Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	262.410.000,00	238.624.098,00	90,94	23.785.902,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	75.000.000,00	64.479.164,00	85,97	10.520.836,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	29.724.000,00	99,08	276.000,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.410.000,00	144.420.934,00	91,75	12.989.066,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.651.994.409,000	54.251.846.635,000	89,45	6.400.147.774,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.593.801.009,000	53.257.261.199,000	89,37	6.336.539.810,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.684.400,00	98.695.320,00	98,02	1.989.080,00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	335.709.000,00	301.529.611,00	89,82	34.179.389,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	44.310.485,00	88,62	5.689.515,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	521.800.000,00	502.473.520,00	96,30	19.326.480,00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000,00	47.576.500,00	95,15	2.423.500,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	898.213.600,00	807.011.220,00	89,85	91.202.380,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	78.840.000,00	56.984.400,00	72,28	21.855.600,00
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	126.284.600,00	114.409.600,00	90,60	11.875.000,00
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000,00	48.881.600,00	81,47	11.118.400,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	142.660.000,00	115.060.000,00	80,65	27.600.000,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	490.429.000,00	471.675.620,00	96,18	18.753.380,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.292.899.000	7.253.432.265	99,46	39.466.735,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	395.000.000	376.239.465	95,25	18.760.535,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.897.899.000	6.877.192.800,00	99,70	20.706.200,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.928.556.000,00	8.694.833.299,00	87,57	1.233.722.701,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.433.512.000,00	1.115.111.600,00	77,79	318.400.400,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.525.000.000,00	6.518.039.950,00	99,89	6.960.050,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	308.344.000,00	223.943.620,00	72,63	84.400.380,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000.000,00	776.918.229,00	64,74	423.081.771,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	461.700.000,00	60.819.900,00	13,17	400.880.100,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.555.106.029,00	36.072.779.332,00	98,68	482.326.697,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.340.157.320,00	17.058.746.292,00	98,38	281.411.028,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.214.948.709,00	19.014.033.040,00	98,95	200.915.669,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.666.881.160,00	16.981.670.827,00	96,12	685.210.333,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.000,00	43.648.500,00	97,00	1.351.500,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.700.000.000,00	8.527.545.139,00	98,02	172.454.861,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.050.069.200,00	3.022.465.773,00	99,09	27.603.427,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.871.811.960,00	5.388.011.415,00	91,76	483.800.545,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.371.596.925,00	28.636.661.789,00	94,29	1.734.935.136,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.233.462.348,00	2.111.413.810,00	94,54	122.048.538,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.601.140.070,00	23.064.545.560,00	93,75	1.536.594.510,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.231.556.513,00	2.166.804.219,00	97,10	64.752.294,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.305.437.994,00	1.293.898.200,00	99,12	11.539.794,00
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.418.153.965,00	918.153.965,00	64,74	500.000.000,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	918.153.965,00	745.735.935,00	81,22	172.418.030,00
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	500.000.000,00	169.872.951,00	33,97	330.127.049,00
		Penataan Organisasi	2.695.778.200,00	2.512.408.662,00	93,20	183.369.538,00
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	550.000.000,00	544.851.210,00	99,06	5.148.790,00
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	400.000.000,00	365.342.051,00	91,34	34.657.949,00
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	991.690.000,00	930.914.308,00	93,87	60.775.692,00
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	400.000.000,00	338.335.995,00	84,58	61.664.005,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	354.088.200,00	332.965.098,00	94,03	21.123.102,00
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	18.628.512.191,00	18.461.055.183,00	99,10	167.457.008,00
		Fasilitasi Keprotokolan	7.163.744.005,00	7.143.892.346,00	99,72	19.851.659,00
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8.884.630.900,00	8.776.163.773,00	98,78	108.467.127,00
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.580.137.286,00	2.540.999.064,00	98,48	39.138.222,00
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama	Indeks Kualitas Kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	110.746.551.891,00	104.407.918.389,00	94,28	6.338.633.502,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
	Efektifitas Koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Administrasi Tata Pemerintahan	1.716.646.245,00	1.591.041.320,00	92,68	125.604.925,00
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama Nilai LPPD	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	555.860.245,00	538.331.555,00	96,85	17.528.690,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	593.610.000,00	534.841.646,00	90,10	58.768.354,00
		Penataan Administrasi Pemerintahan	567.176.000,00	517.868.119,00	91,31	49.307.881,00
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	106.138.867.746,00	100.316.142.864,00	94,51	5.822.724.882,00
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	79.901.151.043,00	75.750.406.471,00	94,81	4.150.744.572,00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	762.000.000,00	487.915.064,00	64,03	274.084.936,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	25.475.716.703,00	24.077.821.329,00	94,51	1.397.895.374,00
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.383.477.000,00	1.023.962.782,00	74,01	359.514.218,00
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	500.000.000,00	339.297.200,00	67,86	160.702.800,00
		Fasilitasi Bantuan Hukum	708.477.000,00	544.005.600,00	76,79	164.471.400,00
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	175.000.000,00	140.659.982,00	80,38	34.340.018,00
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.507.560.900,00	1.476.771.423,00	97,96	30.789.477,00
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	450.000.000	449.898.379	99,98	101.621,00
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	528.514.000	523.249.439	99,00	5.264.561,00
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	529.046.900	503.623.605	95,19	25.423.295,00
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas	Indeks Kualitas Kebijakan bidang perekonomian,	Program Perekonomian Dan Pembangunan	7.191.801.385,00	6.538.289.094,00	90,91	653.512.291,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam					
	Efektifitas Koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.889.741.000,00	1.543.871.308,00	81,70	345.869.692,00
	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	440.000.000,00	362.341.300,00	82,35	77.658.700,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
	dan sumber daya alam					
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	642.026.000,00	534.051.928,00	83,18	107.974.072,00
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	807.715.000,00	647.478.080,00	80,16	160.236.920,00
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.641.460.385,00	1.367.879.852,00	83,33	273.580.533,00
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	750.360.000,00	545.679.181,00	72,72	204.680.819,00
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	631.350.385,00	569.974.237,00	90,28	61.376.148,00
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	259.750.000,00	252.226.434,00	97,10	7.523.566,00
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.563.600.000	2.545.863.934	99,31	17.736.066,00
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	716.200.000	706.672.937	98,67	9.527.063,00
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1.022.400.000	1.016.417.458	99,41	5.982.542,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)		(%)	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	825.000.000	822.773.539	99,73	2.226.461,00
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.097.000.000,00	1.080.674.000,00	98,51	16.326.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	499.000.000,00	491.075.500,00	98,41	7.924.500,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	374.000.000,00	365.701.000,00	97,78	8.299.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	224.000.000,00	223.897.500,00	99,95	102.500,00
Total			303.489.081.155,000	285.024.657.938,000	95,39	18.464.423.217,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2022) realisasi anggaran sebesar **88,23%**, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
Meningkatnya kualitas Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	129,211,504,601.00	115,899,641,973.00	89.70	13,311,862,628.00
		Penataan Organisasi	2,925,790,000.00	1,046,273,483.00	35.76	1,879,516,517.00
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	550,000,000.00	378,303,579.00	68.78	171,696,421.00
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	426,550,000.00	363,993,716.00	85.33	62,556,284.00
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1,770,070,000.00	148,076,188.00	8.37	1,621,993,812.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	179,170,000.00	155,900,000.00	87.01	23,270,000.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
	pimpinan dan perencanaan dan keuangan					
Meningkatnya kualitas Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59,421,349,590.00	48,970,704,703.00	82.41	10,450,644,887.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	100	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	170,400,000.00	160,926,993.00	94.44	9,473,007.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88,127,784.00	81,561,784.00	92.55	6,566,000.00
		Menyediakan Gaji dan Tunjangan	59,132,821,806.00	48,698,215,926.00	82.35	10,434,605,880.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	565,026,000.00	507,068,161.00	89.74	57,957,839.00
Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,496,000.00	15,496,000.00	100.00	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	87,370,000.00	79,082,000.00	90.51	8,288,000.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
perekonomian,administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	barang dan jasa dan sumber daya alam	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19,400,000.00	17,050,000.00	87.89	2,350,000.00
	Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	415,860,000.00	369,760,000.00	88.91	46,100,000.00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26,900,000.00	25,680,161.00	95.47	1,219,839.00
	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,918,153,965.00	875,165,391.00	45.63	1,042,988,574.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	918,153,965.00	733,745,500.00	79.92	184,408,465.00
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,000,000,000.00	141,419,891.00	14.14	858,580,109.00
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	457,850,000.00	453,841,600.00	99.12	4,008,400.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
	Jumlah Aset Kendaraan yang di tertibkan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	27,240,000.00	27,240,000.00	100.00	-
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran Pengamanan Bidang Tanah Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	228,900,000.00	227,816,800.00	99.53	1,083,200.00
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	17,200,000.00	16,234,800.00	94.39	965,200.00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	142,660,000.00	142,660,000.00	100.00	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	41,850,000.00	39,890,000.00	95.32	1,960,000.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,848,223,500.00	5,782,202,462.00	98.87	66,021,038.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	627,770,000.00	627,119,112.00	99.90	650,888.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,876,916,000.00	3,846,070,615.00	99.20	30,845,385.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	310,680,000.00	305,838,030.00	98.44	4,841,970.00
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800,000,000.00	799,325,105.00	99.92	674,895.00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	132,230,000.00	103,439,600.00	78.23	28,790,400.00
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,627,500.00	100,410,000.00	99.78	217,500.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15,017,092,112.00	14,576,060,562.00	97.06	441,031,550.00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,572,617,320.00	1,424,957,900.00	90.61	147,659,420.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,444,474,792.00	13,151,102,662.00	97.82	293,372,130.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahDaerah	14,654,771,254.00	14,437,264,204.00	98.52	217,507,050.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45,000,000.00	44,874,518.00	99.72	125,482.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,431,740,000.00	6,352,571,064.00	98.77	79,168,936.00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,386,031,254.00	2,342,114,759.00	98.16	43,916,495.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,792,000,000.00	5,697,703,863.00	98.37	94,296,137.00
Terealisasinya Output	Capaian Output Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,757,598,162.00	13,475,785,972.00	97.95	281,812,190.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,757,894,956.00	1,713,526,415.00	97.48	44,368,541.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,697,688,457.00	9,475,405,796.00	97.71	222,282,661.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,316,460,222.00	1,306,230,642.00	99.22	10,229,580.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	985,554,527.00	980,623,119.00	99.50	4,931,408.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	14,634,850,018.00	14,433,145,435.00	98.62	201,704,583.00
		Fasilitasi Keprotokolan	5,773,485,618.00	5,575,832,318.00	96.58	197,653,300.00
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	7,304,364,400.00	7,301,048,378.00	99.95	3,316,022.00
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1,557,000,000.00	1,556,264,739.00	99.95	735,261.00
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	57,102,070,467.00	48,604,440,691.00	85.12	8,497,629,776.00
		Administrasi Tata Pemerintahan	1,104,912,245.00	1,008,264,117.00	91.25	96,648,128.00
		Penataan Administrasi Pemerintahan	418,600,000.00	410,535,000.00	98.07	8,065,000.00
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	355,162,245.00	354,228,480.00	99.74	933,765.00
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	331,150,000.00	243,500,637.00	73.53	87,649,363.00
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	53,513,636,222.00	45,741,851,234.00	85.48	7,771,784,988.00
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32,291,761,519.00	29,423,016,165.00	91.12	2,868,745,354.00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1,664,000,000.00	1,462,426,790.00	87.89	201,573,210.00
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Bankeu)	19,557,874,703.00	14,856,408,279.00	75.96	4,701,466,424.00
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,025,000,000.00	482,105,848.00	47.03	542,894,152.00
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	350,000,000.00	184,793,070.00	52.80	165,206,930.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
		Fasilitasi Bantuan Hukum	175,000,000.00	114,993,778.00	65.71	60,006,222.00
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	500,000,000.00	182,319,000.00	36.46	317,681,000.00
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,458,514,000.00	1,372,219,492.00	94.08	86,294,508.00
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	450,000,000.00	366,623,800.00	81.47	83,376,200.00
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	578,514,000.00	576,402,130.00	99.63	2,111,870.00
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	430,000,000.00	429,193,562.00	99.81	806,438.00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	5,192,835,265.00	4,470,679,980.00	86.09	722,155,285.00
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1,378,414,880.00	938,727,211.00	68.10	439,687,669.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	408,668,500.00	251,922,200.00	61.64	156,746,300.00
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	526,481,880.00	330,868,123.00	62.85	195,613,757.00
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	443,264,500.00	355,936,888.00	80.30	87,327,612.00
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,440,870,385.00	1,331,908,444.00	92.44	108,961,941.00
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	265,880,000.00	260,151,122.00	97.85	5,728,878.00
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	964,360,385.00	861,127,322.00	89.30	103,233,063.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	210,630,000.00	210,630,000.00	100.00	-
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,325,000,000.00	1,200,722,085.00	90.62	124,277,915.00
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	500,000,000.00	403,136,500.00	80.63	96,863,500.00
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	300,000,000.00	294,985,585.00	98.33	5,014,415.00
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	525,000,000.00	502,600,000.00	95.73	22,400,000.00
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1,048,550,000.00	999,322,240.00	95.31	49,227,760.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	499,000,000.00	472,001,260.00	94.59	26,998,740.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	275,000,000.00	263,064,530.00	95.66	11,935,470.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	274,550,000.00	264,256,450.00	96.25	10,293,550.00
Total			304.308.454.755.00	290.265.919.382.00	88.23	14.042.535.373.00

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan daya serap realisasi anggaran sebesar 7.16%. (dari 88.23% menjadi 95.39%)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 rata-rata sebesar 102.14% (~~Sangat Tinggi/ Tinggi / Sedang/ Rendah/ Sangat Rendah~~), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan sebesar 100.56% (~~Sangat Tinggi /Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 2) Capaian kinerja Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan sebesar 113.47% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 3) Capaian kinerja Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan sebesar 99.13% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 4) Capaian kinerja Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama sebesar 97,92% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 5) Capaian kinerja Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama sebesar 100.85% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 6) Capaian kinerja Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama sebesar 101,02% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 7) Capaian kinerja Nilai LPPD sebesar 88,57% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 8) Capaian kinerja Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam sebesar 100.56% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 9) Capaian kinerja Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam sebesar 105.67% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).

- 10) Capaian kinerja Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam sebesar 106.10% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 11) Capaian kinerja Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti sebesar 144% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 12) Capaian kinerja Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah sebesar 39.31% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 13) Capaian kinerja Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa sebesar 100 Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 14) Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 15) Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 16) Capaian kinerja Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 17) Capaian kinerja Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 18) Capaian kinerja Jumlah Inovasi sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 19) Capaian kinerja Capaian Output Kegiatan sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 20) Capaian kinerja Persentase realisasi kegiatan fisik sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 21) Capaian kinerja Persentase realisasi keuangan sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 22) Capaian kinerja Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 23) Capaian kinerja Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 24) Capaian kinerja Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)
- 25) Capaian kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi ASN sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)

26) Capaian Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)

27) Capaian kinerja Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran sebesar 100% Sangat Tinggi / ~~Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~)

Capaian kinerja tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 102.14% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 2,85%

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya Review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2) Adanya Perbaikan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 3) Adanya Perbaikan Perjanjian Kinera Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten Signature]
Dr. H. SUNGGONO MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196705011990010001